

BIOPOLITIK NUTRISI DAN *CAPABILITIES APPROACH*: ETIKA PATERNALISME DALAM KEBIJAKAN “MAKAN BERGIZI GRATIS” DI INDONESIA

Wendi Setiawan¹

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana¹

Surel: wendist234@gmail.com

Abstract

Pelaksanaan program nasional “Makan Bergizi Gratis” oleh pemerintahan transisi Indonesia tahun 2025 memunculkan diskursus baru yang melampaui sekadar analisis kebijakan publik dan kalkulasi ekonomi. Artikel ini membedah kebijakan tersebut melalui perspektif filsafat politik untuk menguji ketegangan etis antara kewajiban moral negara dan batas kebebasan individu. Dengan menyilangkan Capabilities Approach dari Amartya Sen dan Martha Nussbaum dan kritik terhadap paternalisme negara dalam konsep kebebasan positif Isaiah Berlin serta biopolitik dari Michel Foucault, studi ini mengeksplorasi dua tesis utama. Pertama, dari perspektif Capabilities Approach, intervensi nutrisi yang dikonseptualisasikan sebagai prasyarat fundamental bagi kebebasan sejati; gizi yang layak adalah fondasi yang membebaskan kapabilitas dasar manusia agar berfungsi di ruang publik. Kedua, dari kacamata kritik paternalisme dan biopolitik, kebijakan ini dianalisis sebagai bentuk pendisiplinan “tubuh-tubuh produktif” di mana negara berpotensi merampas keagenan domestik (keluarga) demi mencetak sumber daya manusia berdedikasi dan eksistensi negara di masa depan. Melalui metode analisis filosofis, artikel ini menemukan bahwa program “Makan Bergizi Gratis” yang beroperasi dalam suatu paradoks, yang membebaskan sekaligus mendisiplinkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran lokus evaluasi program bantuan sosial dari efektivitas pragmatis menuju perdebatan etis mengenai sejauh mana negara dibenarkan untuk mengintervensi ranah privat (MBG) demi mencapai apa yang diklaim sebagai “kebaikan objektif” warga Indonesia.

Keywords: Biopolitik, Capabilities Approach, Kebebasan Positif, Makan Bergizi Gratis, Etika Kebijakan.

Submitted: 24-04-2026

Accepted: 07-06-2026

Published: 30-06-2026

PENDAHULUAN

Transisi kepemimpinan nasional Indonesia pada tahun 2024 yang ditandai dengan babak baru dalam sejarah intervensi sosial negara melalui peluncuran program skala masif, yakni Makan Bergizi Gratis. Program tersebut diusung sebagai program unggulan dari pemerintahan yang baru ini, dan hal tersebut bukan sekadar kebijakan *populis* biasa, melainkan intervensi logistik dan biometrik terbesar dalam sejarah modern dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Dengan target populasi yang menjangkau lebih dari 80 juta jiwa, mulai dari anak usia dini, siswa sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil, program tersebut menelan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahap awal sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025¹. Skala operasional di Indonesia ini menuntut mobilisasi sumber daya pangan,

¹ Kementerian Keuangan RI, *Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2024), 142, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5/BUKU-II-Nota-Kuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf>.

rantai pasok, dan infrastruktur birokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menjadikan negara sebagai aktor penyedia nutrisi harian secara langsung bagi generasi mudanya.

Meskipun memicu perdebatan publik yang luas, diskursus akademik dan tinjauan literatur yang merespons kebijakan tersebut, sejauh ini sangat didominasi oleh rasionalitas teknokratis dan pragmatisme utilitarian. Pendekatan arus utama (*mainstream*) sebagian besar membedah program ini murni dari lensa ilmu ekonomi dan kebijakan publik. Kajian-kajian tersebut berfokus pada ketahanan fisik, skema pembiayaan alternatif, efisiensi rantai pasok (*supply chain management*), hingga kalkulasi *cost-benefit analysis* terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada ranah kesehatan masyarakat, evaluasi kebijakan ini direduksi menjadi metrik medis semata, yakni sebagai instrumen deterministik untuk menekan angka *stunting* nasional menuju target di bawah 14%².

Namun, dominasi analisis teknokratis ini menyisakan celah literatur (*literature gap*) yang sangat terbuka pada dimensi etika politik. Celah tersebut didapati ruang gelap filosofis yang belum terjamah ketika negara, melalui aparatur dan kebijakannya, masuk secara langsung ke dalam "bekal rakyat" warganya. Mengisi celah literatur tersebut menuntut setiap orang untuk mengembalikan diskursus ini pada hakikat politik itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Armada Riyanto, politik sejatinya bukanlah sekadar arena pertarungan elite atau komoditas electoral, melainkan sebuah diskursus mengenai "tata kelola hidup bersama"³. Jika program berskala raksasa seperti "Makan Bergizi Gratis" direduksi murni menjadi kalkulasi populis atau sekadar panggung pencitraan kekuasaan, maka negara sesungguhnya sedang mengkhianati esensi dari politik tersebut. Kebijakan publik yang autentik harus lahir dari nilai tulus untuk menata kehidupan warga secara rasional dan bermartabat, bukan sekadar instrument transaksi untuk melanggengkan dominasi kekuasaan para petinggi.() Mengelola nutrisi harian anak di sekolah pada dasarnya merupakan pergeseran secara radikal lokus kekuasaan; tanggung jawab dan otonomi yang secara historis berada di ranah domestik (keluarga dan orang tua) perlahan didelegasikan, atau bahkan diambil alih, oleh tangan "Leviathan"-nya negara. Thomas Hobbes dalam mahakaryanya mengingatkan bahwa kedaulatan negara (*Leviathan*) dibangun atas penyerahan hak-hak alamiah individu demi jaminan keamanan dan kelangsungan hidup⁴. Akan tetapi, ketika "kelangsungan hidup" itu diterjemahkan secara harfiah menjadi intervensi kalori harian, pertanyaannya adalah: sejauh mana negara berhak mendikte standar kelayakan hidup tanpa mereduksi keagenan moral keluarga?

Dari sinilah permasalahan filosofis ini hadir. Di satu sisi, malnutrisi struktural dapat dipandang sebagai bentuk ketidakbebasan (*unfreedom*). Amartya Sen dalam *Development as Freedom* menegaskan bahwa kemiskinan dan kelaparan bukanlah sekadar ketiadaan

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029," Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, 88, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf.

³ F. X. Eko Armada; Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 50, Yogyakarta, [//librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik](http://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik).

⁴ T. Hobbes and R. Tuck, *Leviathan* (Cambridge University Press, 1996), 120, <https://books.google.co.id/books?id=xE8ecw7ZaPYC>.

pendapatan, melainkan perampasan atas “kapabilitas dasar” manusia⁵. Tanpa nutrisi yang memadai, seorang anak secara biologis tidak memiliki fondasi kognitif untuk menggunakan kebebasannya di masa depan. Namun, di sisi lain, intervensi negara yang terstandarisasi ini berisiko jatuh pada apa yang dikritik oleh Isaiah Berlin sebagai bahaya “kebebasan positif”. Ketika otoritas meyakini bahwa mereka “lebih paham” apa yang baik bagi warganya dibandingkan warga itu sendiri, hal tersebut kerap menjadi justifikasi bagi tindakan paternalisme yang koersif⁶. Lebih dalam lagi, Michel Foucault mengingatkan bahwa perhatian negara pada tubuh populasi sering kali bukan didorong oleh motif humanisme, melainkan biopolitik, yaitu sebuah teknologi kekuasaan untuk mendisiplinkan, menormalisasi, dan mencetak “tubuh-tubuh produktif” yang patuh demi melayani sistem kapitalisme⁷.

METODE

Berpijak pada tegangan paradigmatis tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian sentral: Apakah intervensi langsung negara melalui program “Makan Bergizi Gratis” ini merupakan instrumen emansipatoris yang membebaskan kapabilitas dasar manusia, ataukah ia justru merupakan wujud biopolitik dan paternalisme baru yang merampas keagenan domestik demi mendisiplinkan tubuh untuk kepentingan kapital masa depan? Melalui pertanyaan ini, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dalam kajian kebijakan publik di Indonesia dengan menawarkan pisau analisis filsafat politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mendekonstruksi kebijakan bantuan sosial pangan, yang biasanya diterima begitu saja sebagai “kebaikan moral”, menjadi arena perdebatan etis yang problematis. Dengan menyilangkan *Capabilities Approach* oleh Amartya Sen dengan kritik paternalisme oleh Berlin dan biopolitik oleh Michel Foucault, studi ini diharapkan dapat meletakkan demarkasi etis yang jelas antara kewajiban moral negara dalam mensejahterakan warga, dan batas-batas kebebasan individu yang tidak boleh dilanggar oleh aparatur birokrasi.

PEMBAHASAN

Dua Kutub Filsafat Politik

Dalam membedah kompleksitas etis di balik intervensi negara ke dalam bekal rakyat warganya, artikel ini menempatkan kebijakan “Makan Bergizi Gratis” di tengah ketegangan dialektis antara dua kutub filsafat politik. Kutub pertama adalah tradisi emansipatoris yang diwakili oleh *Capabilities Approach*, yang melihat intervensi negara sebagai prasyarat pembebasan. Kutub kedua adalah tradisi kritis yang diwakili oleh pemikiran Isaiah Berlin dan Michel Foucault, yang mencurigai intervensi afirmatif semacam itu sebagai selubung paternalisme dan pendisiplinan biopolitik.

Capabilities Approach: Gizi sebagai Pra-Kondisi Biologis Keagenan

⁵ Amartya Sen, *Development As Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 2000), 87, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198290124.001.0001>.

⁶ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan [Judul Asli: Four Essays on Liberty]*, trans. Rofiqi, A. Zaim (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 131, https://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=11042&keywords=Four+Essay+on+Liberty.

⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, 1st American ed, Social Theory, 2nd Edition (New York: Pantheon Books, 1978), 139.

Dalam mengevaluasi kesejahteraan dan keadilan sosial, tradisi ekonomi politik klasik sering kali terjebak pada metrik utilitarianisme, seperti akumulasi kekayaan (PDB) atau utilitas (kepuasan). Amartya Sen mendobrak reduksionisme ini melalui *Capabilities Approach*, yang menggeser dasar atas evaluasi keadilan dari “apa yang dimiliki seseorang” menjadi “apa yang secara riil dapat dilakukan dan menjadi apa seseorang tersebut”⁸. Armada Riyanto menyoroti bagaimana interpretasi teks dan kebijakan yang seharusnya memihak pada kemanusiaan.

Untuk memahami pendekatan ini, esensial untuk membedakan dua konsep fundamental, yakni *functionings* (keadaan mengada dan melakukan) dan *capabilities* (kapabilitas atau kebebasan substantif). *Functionings* mencakup kondisi objektif seseorang, mulai dari yang paling dasar seperti “cukup gizi” dan “terhindar dari penyakit mematikan”, hingga yang kompleks seperti “mampu berpartisipasi dalam diskursus politik”. Sementara itu, *capabilities* merujuk pada kebebasan riil atau peluang aktual yang dimiliki individu untuk mencapai *functionings* tersebut⁹ (Sen, *Commodities and Capabilities*, North-Holland, 1985, hlm. 10). Martha Nussbaum mengembangkan lebih lanjut pendekatan ini dengan merumuskan daftar kapabilitas sentral yang wajib dijamin oleh negara demi tegaknya martabat manusia, yang di mana “kesehatan jasmani” (*bodily health*) dan “integritas jasmani” (*bodily integrity*), termasuk di dalamnya hak atas nutrisi yang memadai, ditempatkan sebagai fondasi absolut¹⁰.

Bila dikaitkan langsung dengan isu pangan, *Capabilities Approach* secara fundamental menolak pandangan yang mereduksi gizi atau makanan sekadar sebagai komoditas pasar atau alat bantu pertumbuhan ekonomi. Malnutrisi tidak dilihat semata-mata sebagai kemiskinan material, melainkan sebagai bentuk perampasan kebebasan yang paling brutal (*unfreedom*). Tanpa asupan kalori dan nutrisi mikro yang memadai sejak dini, perkembangan kognitif dan fisik anak akan terhambat secara permanen. Dalam kondisi biologis yang defisit ini, manusia kehilangan *agency* (keagenan)nya. Mereka tidak memiliki kebebasan riil untuk memilih jalan hidup, menempuh pendidikan tinggi, atau berpartisipasi dalam ruang publik yang rasional. Oleh karena itu, dari kacamata Sen dan Nussbaum, intervensi penyediaan makan bergizi oleh negara bukanlah sebuah bentuk sedekah atau efisiensi birokrasi, melainkan kewajiban moral absolut untuk meletakkan “pra-kondisi biologis” agar warga negara mampu menggunakan kebebasan sejati mereka di masa depan.

Isaiah Berlin: Kebebasan Positif dan Bahaya Paternalisme Negara

Meskipun argumen emansipatoris di atas tampak meyakinkan, intervensi negara yang masuk hingga ke ranah paling privat, yakni bekal rakyat, memiliki implikasi filosofis yang berbahaya jika dibedah menggunakan kerangka analitis Isaiah Berlin. Dalam esainya yang sangat berpengaruh, *Two Concepts of Liberty*, Berlin membedah dikotomi antara kebebasan negatif dan kebebasan positif¹¹.

Kebebasan negatif (*negative liberty*) diartikan sebagai ketiadaan campur tangan atau koersi dari pihak lain; ini adalah area di mana individu dibiarkan sendirian untuk melakukan apa yang ia inginkan tanpa halangan eksternal (termasuk dari negara). Di sisi lain, kebebasan

⁸ Amartya Sen, *Commodities And Capabilities* (New York: Elsevier Science Publishers B. V., 1985), 75, <https://dn721600.ca.archive.org/0/items/dli.ernet.474268/474268-Commodities%20And%20Capabilities.pdf>.

⁹ Amartya Sen, *Commodities And Capabilities*, 10.

¹⁰ M. C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Harvard University Press, 2011), 33, <https://books.google.co.id/books?id=Gg7Q2V8fi8gC>.

¹¹ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan [Judul Asli: Four Essays on Liberty]*, 121–122.

positif (*positive liberty*) berakar pada keinginan individu untuk menjadi “tuan atas dirinya sendiri” (*self-mastery*). Ini adalah dorongan untuk diarahkan oleh rasionalitas, kesadaran tertinggi, dan tujuan-tujuan moral, bukan digerakkan oleh dorongan irasional, kelemahan, atau ketidaktahuan¹².

Kritik tajam Berlin dan ketakutan terbesarnya justru terletak pada manipulasi konsep “kebebasan positif” ini oleh otoritas negara. Ketika negara mengadopsi peran penyedia gizi massal, negara beroperasi dengan logika kebebasan positif: negara berasumsi bahwa ada “diri yang lebih tinggi atau rasional” (*higher self*) dari warganya yang belum tercapai akibat kebodohan, kemiskinan, atau pola asuh keluarga yang salah sasaran. Otoritas mengklaim “lebih tahu” apa yang secara objektif terbaik bagi kelangsungan biologis anak-anak tersebut dibandingkan orang tua mereka sendiri.

Logika ini sangat rentan bermutasi menjadi justifikasi bagi paternalisme koersif. Demi mencapai “apa yang terbaik” bagi warganya (pembebasan dari *stunting*), negara merasa berhak untuk mengintervensi, mengambil alih keagenan domestik, dan memaksakan standar nutrisi teknokratis. Keluarga miskin diposisikan secara epistemik sebagai subjek yang “tidak rasional” atau “tidak kompeten” dalam menyusun menu makanan anak mereka. Akibatnya, kebebasan negatif keluarga, yakni hak otonom untuk mengatur ruang domestik dan meja makan mereka tanpa campur tangan birokrasi, dikikis habis atas nama “kebaikan yang lebih besar”. Berlin memperingatkan bahwa pemaksaan kebaikan secara sepihak ini, selembut apa pun wujudnya (seperti pembagian bantosan makanan), tetap merupakan bentuk pengingkaran terhadap martabat manusia yang otonom¹³.

Michel Foucault: Biopolitik dan Anatomi-Politik atas Tubuh

Jika Berlin melihat intervensi ini sebagai bahaya paternalisme, Michel Foucault melangkah lebih jauh dengan membongkar motif tersembunyi kekuasaan di balik narasi “kesejahteraan” negara. Untuk membaca kebijakan gizi massal, kita harus memahami pergeseran genealogis kekuasaan yang dirumuskan Foucault, yakni dari *sovereign power* menuju *biopower*. Di era pramodern, kekuasaan berdaulat (*sovereign power*) beroperasi melalui paradigma penguasaan teritorial dan hak deduktif; hak raja untuk mencabut nyawa atau membiarkan hidup (*take life or let live*). Namun, memasuki abad ke-18 dan ke-19, seiring lahirnya kapitalisme industri, kekuasaan bertransformasi secara fundamental menjadi *biopower*. Target kekuasaan bukan lagi wilayah, melainkan “kehidupan” itu sendiri. Hak penguasa berbalik menjadi kekuasaan untuk “membuat hidup dan membiarkan mati” (*make live and let die*)¹⁴.

Biopower ini beroperasi melalui dua poros utama. Poros pertama adalah “biopolitik populasi”, yang berfokus pada manajemen fenomena biologis massal seperti angka kelahiran, mortalitas, endemi, dan secara krusial: kesehatan jasmani dan standar gizi. Poros kedua adalah “anatomi-politik tubuh manusia”, di mana tubuh individu diperlakukan layaknya mesin. Dalam karyanya *Discipline and Punish*, Foucault menggarisbawahi bagaimana institusi modern (sekolah, barak, rumah sakit) beroperasi untuk mengoptimalkan kemampuan tubuh, memeras

¹² Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan* [Judul Asli: *Four Essays on Liberty*], 131.

¹³ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan* [Judul Asli: *Four Essays on Liberty*], 133.

¹⁴ Foucault, *The History of Sexuality*, 139.

utilitas produktifnya, sekaligus meningkatkan kepatuhannya¹⁵. Bila pisau analisis Foucaultian ini dibedahkan pada kebijakan “Makan Bergizi Gratis”, motif emansipatoris yang diusung oleh *Capabilities Approach* segera runtuh. Perhatian masif dan investasi triliunan rupiah dari negara ke dalam asupan kalori dan protein anak-anak sekolah sejatinya bukanlah didorong oleh cinta kasih atau humanisme murni. Sebaliknya, ini adalah wujud mutakhir dari biopolitik dan anatomi-politik. Tubuh jutaan anak Indonesia direduksi menjadi “sumber daya manusia”, yakni mesin biologis yang harus ditingkatkan spesifikasinya.

Negara berkepentingan memberikan makan bukan agar anak-anak tersebut bahagia secara intrinsik, melainkan karena tubuh yang kurus dan berpenyakit (*stunted*) tidak akan kompetitif di pasar tenaga kerja global puluhan tahun ke depan. Tubuh mereka dikalkulasi, diukur Indeks Massa Tubuhnya (IMT), dan diberikan standarisasi diet agar kelak mereka tumbuh menjadi tubuh-tubuh yang produktif, yang patuh, kuat bekerja keras, dan mampu memutar roda sistem ekonomi politik kapitalisme masa depan. Dengan mengambil alih bekal rakyat, negara sesungguhnya sedang melakukan peternakan biologis (*human husbandry*), memonopoli pencetakan tubuh warganya demi memastikan eksistensi dan kejayaan ekonomi negara itu sendiri.

Nutrisi Sebagai Prasyarat Kebebasan

Jika kritik terhadap intervensi negara sering kali berakar pada ketakutan akan hilangnya otonomi individu, pembelaan terhadap kebijakan “Makan Bergizi Gratis” menuntut kita untuk mendefinisikan ulang apa yang sebenarnya dimaksud dengan otonomi dan kebebasan itu sendiri. Dengan menggunakan lensa *Capabilities Approach* yang digagas oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum, intervensi afirmatif negara ke dalam ranah pemenuhan gizi bukanlah sebetulnya koersi yang merampas hak warga, melainkan prasyarat mutlak bagi terciptanya kebebasan sejati dan keagenan (*agency*) manusia di tengah ketimpangan struktural.

Diskursus yang menolak campur tangan negara di ranah domestik sering kali berangkat dari asumsi bahwa keluarga memiliki “kebebasan negatif” yang utuh, yakni ketiadaan halangan untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk memilih asupan makanan bagi anak-anak mereka. Namun, asumsi ini menjadi cacat secara fatal ketika dihadapkan pada realitas material kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Amartya Sen secara radikal mendekonstruksi pemahaman tradisional tentang kemiskinan; baginya, kemiskinan tidak boleh sekadar diukur dari rendahnya utilitas atau minimnya pendapatan, melainkan harus dipahami secara mendasar sebagai “perampasan kapabilitas dasar” (*capability deprivation*)¹⁶. Seseorang baru bisa dikatakan “bebas” jika ia memiliki kapabilitas substantif, yaitu serangkaian peluang nyata untuk memilih cara hidup yang ia hargai¹⁷.

Di sinilah letak persoalannya: bagi jutaan keluarga prasejahtera, otonomi untuk menyediakan gizi yang layak di atas meja makan adalah sebuah ilusi belaka. Ketika struktur ekonomi yang timpang memaksa seorang ibu untuk memilih antara membeli beras murah berkualitas rendah atau membayar sewa tempat tinggal, ia sebenarnya tidak sedang

¹⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Shediran (Paris: Edition Gallimard, 1975; 2nd ed., USA: Vintages Books, 1977), 138, https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf.

¹⁶ Amartya Sen, *Development As Freedom*, 87.

¹⁷ Amartya Sen, *Development As Freedom*, 92.

mempraktikkan “kebebasan memilih”. Ia sedang terjebak dalam kondisi deterministik yang memaksanya bertahan hidup dengan opsi-opsi yang sama-sama mendehumanisasi. Oleh karena itu, argumen bahwa kebijakan “Makan Bergizi Gratis” merampas keagenan domestik kehilangan pijakan etisnya. Keagenan tersebut pada faktanya sudah dirampas lebih dulu oleh kemiskinan struktural. Tanpa adanya intervensi dari negara, anak-anak dari keluarga miskin mewarisi ketidakbebasan ini secara biologis. Membiarkan mekanisme pasar atau kemiskinan mendikte asupan gizi anak bukanlah wujud penghormatan terhadap otonomi keluarga, melainkan bentuk pembiaran negara (*state omission*) yang melanggengkan ketidakbebasan. Kewajiban moral negara ini menemukan pijakan filosofisnya yang paling kukuh dalam etika kekuasaan. Armada Riyanto secara tegas mengingatkan bahwa kekuasaan tidak memiliki legitimasi etis jika ia hanya melayani dirinya sendiri; sebaliknya, esensi kekuasaan harus diarahkan untuk melayani kelompok “yang paling rapuh” dalam lingkup masyarakat. Dalam konteks ini, anak-anak yang mengalami malnutrisi dan keluarga prasejahtera adalah representasi nyata dari kelompok paling rapuh tersebut. Oleh karena itu, intervensi negara melalui penyediaan gizi bukan sekadar bentuk efisiensi birokrasi, melainkan pembuktian dari etika kekuasaan itu sendiri, bahwa penguasa bersedia menunduk dan berpihak pada mereka yang terpinggirkan, mengangkat harkat mereka agar kelak mampu berdiri sejajar dalam ruang kebebasan yang substantif.¹⁸

Lebih jauh dari sekadar isu pemenuhan rasa lapar, *Capabilities Approach* meletakkan kesehatan jasmani sebagai fondasi bagi partisipasi politik dan rasionalitas. Martha Nussbaum, dalam merumuskan sepuluh Kapabilitas Sentral (*Central Capabilities*), menempatkan *Bodily Health* (Kesehatan Jasmani) dan *Bodily Integrity* (Integritas Jasmani) pada urutan teratas. Hak untuk memiliki kesehatan yang baik, termasuk mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, adalah syarat mutlak (*sine qua non*) agar manusia dapat berfungsi secara bermartabat¹⁹.

Jika tubuh manusia kekurangan gizi kronis pada masa krusial perkembangannya, yang memicu kondisi *stunting* atau tengkes, dampaknya tidak hanya terbatas pada dimensi anatomis, tetapi secara destruktif merusak perkembangan neurologis dan kognitif. Tubuh yang kekurangan gizi tidak akan pernah mampu berpartisipasi secara rasional, kritis, dan setara dalam ruang demokrasi (*public sphere*). Demokrasi deliberatif mensyaratkan warganya untuk memiliki kapasitas nalar praktis (*practical reason*), kemampuan untuk membentuk konsepsi tentang yang baik dan terlibat dalam refleksi kritis mengenai perencanaan hidup²⁰. Seorang anak yang kapasitas kognitifnya terhambat akibat malnutrisi akan tumbuh menjadi warga negara yang rentan terhadap manipulasi politik dan populisme. Mereka teralienasi dari diskursus publik karena kapasitas intelektual mereka telah dipangkas sejak dini oleh kondisi biologis yang tidak memadai. Penyediaan makan bergizi oleh negara, dengan demikian, harus dibaca sebagai infrastruktur kognitif kewarganegaraan. Dengan memberi makan anak-anak di sekolah, negara sedang memastikan bahwa di masa depan, para warga negara ini memiliki kebebasan politik riil (*political freedoms*) dan instrumen rasionalitas untuk menuntut hak-haknya²¹.

¹⁸ F. X. Eko Armada; Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 145, Yogyakarta, [//librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik](http://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik).

¹⁹ Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, 33–34.

²⁰ Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, 34.

²¹ Amartya Sen, *Development As Freedom*, 152.

Berpijak pada argumen tersebut, kebijakan “Makan Bergizi Gratis” dapat dikonseptualisasikan ulang bukan sebagai bentuk paternalisme yang menindas, melainkan sebagai pembebasan melalui aksi afirmatif. Tuduhan bahwa negara “mengambil alih” fungsi keluarga dan memaksakan standar kebbaikannya sendiri (sebagaimana yang dikhawatirkan dalam kritik kebebasan positif Isaiah Berlin) keliru membaca hakikat dari program pemenuhan kebutuhan dasar. Paternalisme menjadi buruk dan koersif ketika ia merampas hak individu dewasa yang rasional untuk memilih jalan hidupnya. Namun, dalam konteks hak anak atas gizi, kita berhadapan dengan subjek yang belum memiliki otonomi penuh dan sangat bergantung pada struktur di luar dirinya. Negara, dalam kerangka *Capabilities Approach*, memiliki kewajiban moral yang tak bisa ditawar untuk bertindak sebagai penjamin akhir (*ultimate guarantor*) atas hak-hak dasar warganya, terutama ketika institusi keluarga gagal atau tidak mampu menyediakannya²².

Intervensi langsung negara ke dalam bekal rakyat siswa sekolah tidak berupaya merampas kebebasan hari ini, melainkan sedang memberikan pijakan dasar agar otonomi dan kebebasan itu bisa tumbuh di masa depan. Ini adalah perwujudan dari keadilan distributif yang berupaya meratakan garis awal kehidupan. Negara tidak mendikte cita-cita politik anak-anak tersebut kelak; negara hanya memastikan bahwa tubuh dan pikiran mereka memiliki kebutuhan yang cukup untuk merumuskan serta menggapai cita-cita tersebut. Singkatnya, melalui kacamata Sen dan Nussbaum, kebijakan pangan afirmatif skala nasional tidak mewakili wajah Leviathan yang menakutkan, melainkan bentuk pemenuhan janji kontrak sosial yang paling elementer: memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terhalang menjadi manusia seutuhnya hanya karena mereka lahir dalam keluarga yang tidak mampu menyediakan gizi yang layak.

Bekal rakyat sebagai Arena Biopolitik

Memutar secara radikal perspektif emansipatoris sebelumnya, analisis kritis terhadap kebijakan “Makan Bergizi Gratis” menyingkap dimensi kekuasaan yang lebih gelap dan subtil. Ketika narasi dominan memuji intervensi gizi sebagai wujud kewajiban moral negara, kerangka filsafat kritis memaksa kita untuk mencurigai motif di balik kebaikan tersebut. Melalui persilangan kritik kebebasan positif Isaiah Berlin dan genealogi biopolitik Michel Foucault, intervensi afirmatif negara ke dalam bekal rakyat warganya tidak lagi dibaca sebagai pembebasan kapabilitas, melainkan sebagai wujud paternalisme yang merampas keagenan domestik dan se bentuk pendisiplinan tubuh demi melayani mesin ekonomi politik masa depan. Armada Riyano juga mengkritik secara implisit, bagaimana mereka belum mencapai diri sebagai “Aku” yang bersama dengan “Liyan”. Kritik Armada Riyanto ini tidak serta merta menyoroti soal “Bekal Rakyat” itu, tetapi dasar motivasi apakah mereka melakukan program tersebut, dan alih-alih memberikan kesejahteraan, malah menjadi senjata yang memngaruhi hidup manusia serta penindasan yang dikedoki dengan kecukupan gizi. Di sinilah “Aku” harus bertindak dan punya jiwa yang relasional dengan orang lain²³.

Ruang domestik, dan secara spesifik bekal rakyat keluarga, secara historis merupakan benteng otonomi absolut yang berada di luar jangkauan aparatur negara. Di sanalah keagenan

²² Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, 64.

²³ Armada; Riyanto, *Relasionalitas - Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 280, Yogyakarta, [//librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=6224&keywords=Relasionalitas](http://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=6224&keywords=Relasionalitas).

seorang ibu atau orang tua beroperasi sepenuhnya dalam menentukan apa yang terbaik bagi anak-anak mereka, didorong oleh kasih sayang intrinsik dan kearifan lokal. Namun, kebijakan penyediaan makan secara tersentralisasi dan massal secara halus mendekonstruksi otonomi tersebut. Berpijak pada peringatan Isaiah Berlin mengenai bahaya “kebebasan positif”, kebijakan ini beroperasi dengan asumsi dasar bahwa negara, dengan aparatur teknokratisnya, memiliki konsepsi yang “lebih tinggi dan rasional” tentang kebaikan objektif dibandingkan warga negaranya sendiri²⁴.

Ketika negara mengambil alih fungsi penyediaan gizi, ada implikasi epistemik yang sangat merendahkan: keluarga miskin dianggap telah “gagal”, “tidak kompeten”, atau “irasional” dalam mengurus asupan biologis anak-anaknya. Negara memosisikan diri sebagai figur paternal (bapak) yang harus turun tangan menyelamatkan anak-anak dari “kebodohan” nutrisi orang tua mereka. Ini adalah bentuk eskalasi dari paternalisme lunak (*soft paternalism*) menuju paternalisme struktural. Kebebasan negatif keluarga, yakni hak untuk tidak diintervensi dalam urusan rumah tangga mereka, dikorbankan atas nama pencapaian standar kesehatan yang didefinisikan secara sepihak oleh birokrasi. Berlin dengan tajam mengingatkan bahwa ketika otoritas membenarkan koersi atau intervensi atas nama “kepentingan terbaik” warganya yang dianggap belum rasional, otoritas tersebut sedang membuka pintu menuju tiranisme yang bersembunyi di balik jubah kebajikan²⁵. Bekal rakyat, yang sejatinya adalah instrumen otonomi domestik, kini bermutasi menjadi instrumen ketergantungan pada Leviathan.

Kecurigaan filosofis ini menemukan bentuknya yang paling telanjang ketika dibedah menggunakan kacamata Michel Foucault. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: mengapa tiba-tiba negara menaruh kepedulian yang begitu masif, hingga mengalokasikan puluhan triliun rupiah, pada jumlah kalori dan protein yang masuk ke mulut anak sekolah? Jawabannya tidak terletak pada humanisme, melainkan pada transformasi kekuasaan menuju *biopower*. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi berfokus pada ancaman kematian (*sovereign power*), melainkan beralih pada administrasi kehidupan biologis populasi demi memastikan utilitas maksimal mereka (*make live*)²⁶.

Intervensi gizi negara adalah manifestasi sempurna dari apa yang disebut Foucault sebagai “anatomi-politik tubuh manusia” (*anatomo-politics of the human body*)²⁷. Dalam paradigma ini, tubuh anak-anak tidak dilihat sebagai subjek manusia yang bermartabat secara inheren, melainkan direduksi menjadi mesin biologis atau sekadar “sumber daya manusia”. Hal ini tervalidasi secara gamblang dalam retorika politik arus utama yang selalu mengaitkan program makan bergizi dengan visi “Generasi Emas 2045”. Retorika ini adalah bahasa ekonomi kapitalistik. Negara tidak sedang memberi makan anak-anak agar mereka bahagia di masa kecilnya, melainkan sedang melakukan investasi biologis jangka panjang. Negara membutuhkan tenaga kerja yang sehat, kuat, dan kognitifnya memadai agar kelak bisa bersaing di pasar global, menarik investasi asing, dan memutar roda kapitalisme negara. Tubuh anak yang kurus (*stunted*) adalah “mesin yang rusak” dan tidak efisien bagi masa depan ekonomi; dan oleh karena itu, ia harus diservis dan ditingkatkan spesifikasinya melalui program gizi massal. Dengan kata lain, negara mengambil alih fungsi keagenan domestik semata-mata untuk

²⁴ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan* [Judul Asli: *Four Essays on Liberty*], 131.

²⁵ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan* [Judul Asli: *Four Essays on Liberty*], 133.

²⁶ Foucault, *The History of Sexuality*, 139.

²⁷ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 136.

mencetak dan beternak “tubuh-tubuh produktif” demi melanggengkan eksistensinya sendiri. Objektifikasi tubuh anak-anak ini juga selaras dengan peringatan Armada Riyanto mengenai runtuhnya etika relasional ketika penguasa (Aku) menjadikan rakyat miskin (Liyan) sekadar sebagai suatu obyek proyek. Ketika tatapan penderitaan “Liyan” direspons dengan kalkulasi teknokratis demi kepentingan ekonomi negara di masa depan, alih-alih dilayani kemanusiaannya, maka kebijakan tersebut telah cacat secara moral²⁸.

Dimensi kontrol biopolitik ini semakin menguat melalui mekanisme penyeragaman dan standardisasi (*disciplinary power*) yang inheren dalam operasional program tersebut. Pembentukan Badan Gizi Nasional yang mendikte menu, standar kalori, dan tata cara distribusi dari pusat ke daerah adalah bentuk pendisiplinan birokratis terhadap tubuh warga. Makanan direduksi eksistensinya menjadi sekadar perhitungan teknokratis-matematis: sekian gram protein, sekian miligram zat besi, dan sekian ratus kalori per porsi. Pendekatan materialistis ini sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa makanan memiliki dimensi subjektivitas kultural yang mendalam.

Dari perspektif antropologi budaya, makanan bukan sekadar bahan bakar biologis, melainkan teks kultural, simbol identitas komunal, dan ruang transmisi nilai-nilai moral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses memasak dan memilih bahan makanan di tingkat keluarga adalah ritual budaya. Namun, ketika bekal rakyat diseragamkan oleh negara, yang di mana anak-anak di berbagai wilayah dipaksa menerima asupan yang telah distandardisasi di atas kertas, yang di mana negara sedang melakukan homogenisasi selera. Tubuh-tubuh dipaksa untuk beradaptasi dengan ritme dan standar nutrisi yang diwajibkan oleh pusat kekuasaan, menceraub akar sosiologis makanan dari ruang-ruang komunalnya. Penyeragaman ini adalah bentuk penaklukan mikroskopis; pendisiplinan selera lokal di bawah panji normalisasi gizi nasional²⁹. Pada akhirnya, kebijakan makan siang ini bukan hanya menyuapi perut warganya, tetapi secara diam-diam menelan otonomi kultural dan domestik ke dalam perut birokrasi negara yang rakus.

Etika Paternalisme Lunak (*Soft Paternalism*) dalam Kebijakan Pangan

Membenturkan proyek emansipatoris Amartya Sen dengan genealogi kritis Michel Foucault dan Isaiah Berlin membawa diskursus kebijakan “Makan Bergizi Gratis” pada sebuah persimpangan filosofis yang problematis. Jika menolak intervensi negara berarti membiarkan anak-anak terbelenggu dalam ketidakbebasan biologis akibat kemiskinan struktural, maka menerima intervensi negara secara buta berarti merelakan bekal rakyat dikolonialisasi oleh mesin biopolitik yang mendisiplinkan tubuh demi kepentingan kapital. Untuk keluar dari kebuntuan biner ini, artikel ini mengajukan sebuah sintesis etis melalui kerangka “Paternalisme Lunak” (*Soft Paternalism*) yang dioperasionalkan melalui prinsip desentralisasi radikal dan “Deliberasi Gizi”.

Sebagai titik tolak sintesis, kita harus secara jujur mengakui sebuah paradoks yang tak terhindarkan dalam tata kelola pemerintahan modern: bahwa kebijakan afirmatif sering kali harus mendisiplinkan agar bisa membebaskan. Tubuh yang rentan harus dikelola dan diintervensi asupannya agar kapabilitas dasarnya dapat mekar. Gerald Dworkin, dalam diskursusnya mengenai otonomi, merumuskan konsep *soft paternalism* (paternalisme lunak),

²⁸ Riyanto, *Relasionalitas - Filsafat Fondasi Interpretasi*, 280.

²⁹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 183.

di mana intervensi negara secara moral dapat dibenarkan apabila subjek yang diintervensi (dalam hal ini anak-anak dan keluarga prasejahtera) berada dalam kondisi di mana otonomi dan rasionalitas penuh mereka terhambat oleh faktor eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kemiskinan ekstrem³⁰. Dalam konteks ini, negara diizinkan untuk bertindak layaknya “orang tua sementara”, bukan untuk menundukkan, melainkan untuk menjaga agar kebebasan fundamental individu tersebut tidak hancur sebelum ia sempat menggunakannya.

Namun, pengakuan atas kebutuhan paternalisme lunak ini segera menuntut setiap orang untuk menarik sebuah garis demarkasi etis yang tegas. Kapan sebuah intervensi gizi berubah dari proyek “emansipasi kapabilitas” (Sen) menjadi instrumen “kontrol tiranik dan anatomi-politik” (Foucault)? Jawabannya tidak terletak pada niat atau tujuan kebijakan tersebut, melainkan secara absolut berada pada metode implementasinya. Intervensi berubah menjadi tiranik ketika negara memonopoli keagenan epistemic, yakni ketika birokrasi pusat mengklaim hak tunggal untuk mendefinisikan apa yang disebut “bergizi”, menyusun menu secara seragam, dan mendistribusikannya secara mekanis layaknya pakan ternak. Ketika kebijakan diimplementasikan dengan logika *top-down* yang teknokratis, negara mereduksi warga negaranya, terutama para ibu dan komunitas lokal, menjadi sekadar reseptor pasif, memvalidasi ketakutan Berlin akan bahaya pemaksaan “kebebasan positif” oleh otoritas³¹.

Untuk mencegah kebijakan ini tergelincir menjadi biopolitik otoritarian, artikel ini menawarkan sebuah solusi filosofis praksis: implementasi “Deliberasi Gizi” melalui desentralisasi radikal. Konsep ini meminjam kerangka demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas, yang menekankan bahwa legitimasi sebuah hukum atau kebijakan publik (termasuk standar gizi) hanya dapat dicapai jika ia lahir dari proses diskursus rasional yang melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut³². Pendekatan ini merupakan wujud nyata dari apa yang disebut Armada Riyanto sebagai “Fenomena Keadilan”, yang di mana teks kebijakan atau juru teknis dari program pemerintah tersebut tidak boleh dibaca secara legal-formal yang kaku³³. Penafsiran kebijakan hendaknya selalu memihak kepada kemanusiaan. Maksudnya adalah implementasi program harus memberikan ruang hidup bagi petani lokal dan otonomi kultural dapur-dapur komunal, bukan mematikan mereka lewat penyeragaman tender logistic berskala raksasa. Kemudian dalam praktiknya, Deliberasi Gizi mensyaratkan pembagian peran yang ketat antara negara dengan masyarakat sipil. Negara membatasi perannya murni sebagai fasilitator kapabilitas: menyediakan sumber daya material, anggaran, dan pedoman nutrisi dasar (makronutrien yang dibutuhkan). Namun, otoritas eksekusi, penentuan menu harian, proses memasak, hingga integrasi nilai-nilai sosiokultural atas makanan harus diserahkan sepenuhnya kepada komunitas lokal, seperti komite sekolah, paguyuban orang tua, ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), atau koperasi petani setempat.

Metodologi desentralistik ini memberikan dua solusi etis sekaligus. Pertama, ia memenuhi tuntutan *Capabilities Approach* karena negara tetap hadir memastikan bahwa tidak ada anak yang kelaparan atau kekurangan gizi akibat kemiskinan keluarganya. Kedua, ia

³⁰ Gerald Dworkin, *The Theory and Practice of Autonomy*, with Internet Archive (Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988), 124–125, <http://archive.org/details/theorypracticeof0000dwor>.

³¹ Isaiah Berlin, *Empat Esai Kebebasan [Judul Asli: Four Essays on Liberty]*, 133.

³² J. Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Polity Press, 1997), 269, <https://books.google.co.id/books?id=2OqWQgAACAAJ>.

³³ Riyanto, *Relasionalitas - Filsafat Fondasi Interpretasi*, 426.

menetralisir bahaya biopolitik Foucaultian dan ancaman paternalisme koersif Berlin. Dengan menyerahkan proses produksi makanan kembali ke tangan komunitas, negara mengembalikan keagenan domestik yang sempat terancam dirampas. “Kebebasan positif” untuk menentukan apa yang baik dan sehat bagi anak-anak tidak lagi dimonopoli oleh birokrat di pusat kekuasaan, melainkan direbut kembali dan dipraktikkan secara kolektif di ranah komunal. Melalui Deliberasi Gizi, makanan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas biometrik yang dihitung berdasarkan gramasi protein dan kalori, melainkan dipertahankan esensinya sebagai artefak kebudayaan dan medium interaksi sosial. Proses memasak secara gotong royong di dapur-dapur komunal sekolah menjadi arena di mana otonomi lokal dirayakan, bukan didisiplinkan. Dengan demikian, program “Makan Bergizi Gratis” dapat diselamatkan dari jebakan peternakan biologis massal, dan bertransformasi menjadi sebuah praksis kewarganegaraan yang emansipatoris, sebuah wujud kepedulian negara yang memberdayakan (*empowering care*), bukan kepedulian yang menaklukkan (*subjugating care*).

PENUTUP

Penulis telah menunjukkan secara gamblang bahwa program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas dalam transisi pemerintahan Indonesia tahun 2024 bukanlah sebuah kebijakan teknokratis yang bebas nilai (*value-neutral*). Di balik narasi populis mengenai pengentasan *stunting* dan kalkulasi makroekonomi, intervensi logistik berskala raksasa ini menyembunyikan tegangan filosofis yang tajam antara kewajiban moral afirmatif negara dan batas-batas otonomi individu. Melalui persilangan kerangka *Capabilities Approach* (Sen dan Nussbaum) dengan kritik paternalisme (Berlin) dan biopolitik (Foucault), diskursus ini menyingkap sebuah paradoks etis: negara memang wajib menyediakan fondasi biologis agar kapabilitas dasar warga negara dapat mekar di tengah kemiskinan struktural, namun di saat yang sama, intervensi tersebut sangat rentan bermutasi menjadi se bentuk kontrol pendisiplinan yang mengerosi kebebasan ruang domestik. Oleh karena itu, peringatan kritis yang diajukan dalam studi ini tidak boleh diabaikan dalam fase implementasinya. Tanpa adanya landasan etika yang secara sadar menghormati dan melibatkan otonomi keluarga serta komunitas lokal, seperti melalui mekanisme “Deliberasi Gizi”, program bantuan sosial pangan akan tergelincir dari tujuan emansipatorisnya. Alih-alih membebaskan anak-anak dari jerat ketidakbebasan kognitif dan biologis, negara justru berisiko mempraktikkan apa yang secara filosofis dapat dikritik sebagai “peternakan manusia” (*human husbandry*) versi modern. Dalam skenario biopolitik ini, tubuh warga negara sejak usia dini tidak diperlakukan sebagai subjek moral yang otonom dan bermartabat, melainkan direduksi semata-mata menjadi aset biologis yang asupan kalorinya dikalkulasi serta dikontrol penuh oleh pusat demi melayani kelancaran mesin ekonomi-politik di masa depan.

Sebagai implikasi ke depan, kajian ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma dalam tradisi evaluasi kebijakan publik di Indonesia. Keberhasilan sebuah inisiatif negara yang secara radikal menyentuh ranah privat warganya tidak lagi memadai jika hanya diukur melalui audit kepatuhan finansial oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), metrik efisiensi logistik, atau sekadar survei tingkat kepuasan politik musiman. Evaluasi kebijakan publik di Indonesia harus mulai mengintegrasikan parameter filsafat moral secara serius. Ruang-ruang birokrasi harus senantiasa mempertanyakan sejauh mana sebuah instrumen kesejahteraan mampu mempertahankan keagenan warga, dan pada titik demarkasi mana negara telah melampaui kewenangannya hingga merampas kebebasan kultural warganya. Hanya dengan mengawinkan kepekaan etis dan rasionalitas teknokratis, negara dapat memenuhi janji konstitusionalnya

untuk menyejahterakan rakyat tanpa harus menjelma menjadi *Leviathan* yang tiranik lewat bekal di tangan warga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. *Commodities and Capabilities*. New York: Elsevier Science Publishers B. V., 1985. <https://dn721600.ca.archive.org/0/items/dli.ernet.474268/474268-Commodities%20And%20Capabilities.pdf>.
- . *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 2000. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198290124.001.0001>.
- Dworkin, Gerald. *The Theory and Practice of Autonomy*. With Internet Archive. Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1988. <http://archive.org/details/theorypracticeof0000dwor>.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality*. 1st American ed. Social Theory, 2nd Edition. New York: Pantheon Books, 1978.
- Habermas, J. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Polity Press, 1997. <https://books.google.co.id/books?id=2OqWQgAACAAJ>.
- Hobbes, T., and R. Tuck. *Leviathan*. Cambridge University Press, 1996. <https://books.google.co.id/books?id=xE8ecw7ZaPYC>.
- Isaiah Berlin. *Empat Esai Kebebasan [Judul Asli: Four Essays on Liberty]*. Translated by Rofiqi, A. Zaim. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004. https://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=11042&keywords=Four+Essay+on+Liberty.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029.” Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2025. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf.
- Kementrian Keuangan RI. *Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5/BUKU-II-Nota-Kuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf>.
- Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Shediran. Paris: Edition Gallimard, 1975. 2nd ed. USA: Vintages Books, 1977. https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf.
- Nussbaum, M. C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=Gg7Q2V8fi8gC>.
- Riyanto, Armada; *Relasionalitas - Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius, 2018. Yogyakarta. [//librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=6224&keywords=Relasionalitas](https://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=6224&keywords=Relasionalitas).
- Riyanto, F. X. Eko Armada; *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011. Yogyakarta. [//librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik](https://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=13599&keywords=Berfilsafat+Politik).